

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pendidikan yang berkualitas merupakan sebuah tuntutan pokok yang harus segera dipenuhi untuk mempercepat dan menciptakan suatu proses pembangunan. Hal ini dikarenakan lembaga pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam upaya membangun bangsa yang kuat dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan di setiap aspek pengelolaannya. Harapan yang akan dicapai adalah lembaga pendidikan dapat mencetak generasi yang mumpuni, yang memiliki daya saing tinggi baik dalam *skill* maupun intelektualitasnya. Hal itupun sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam visi, misi dan strategi yang diterapkan dalam Renstra Kemendiknas untuk tahun 2010-2014, bahwa Visi pendidikan Indonesia hingga 2025 ialah; Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Untuk mencapai itu semua pemerintah dalam kurun waktu 2010-2014 menetapkan visi; Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif. Dan tujuan tersebut dapat tercapai jika lembaga pendidikan itu sendiri dapat memposisikan

dirinya sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional, artinya setiap lembaga pendidikan mampu mengelola lembaganya agar mencapai kualitas yang lebih baik.

Sejalan dengan hal itu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berkualitas, bermartabat, berakhlak mulia dan menghargai keberagaman sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat Indonesia dan tanpa diskriminasi. Komitmen pemerintah terhadap pendidikan harus tercermin pada kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu perlu disediakan pendidikan yang bermutu dan terjangkau. Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi Indonesia.

Menurut Edward Sallis (1984) dalam *Total Quality Management in Education*, bahwa kondisi yang menyebabkan rendahnya mutu lembaga pendidikan dapat berasal dari berbagai macam sumber, yaitu miskinnya perancangan kurikulum, ketidak-cocokan pengelolaan gedung, lingkungan kerja yang tidak kondusif, ketidaksesuaian sistem dan prosedur (manajemen), serta tidak cukupnya jam pelajaran, kurangnya sumber daya, dan pengadaan tenaga profesional. Berbagai macam sumber tersebut memang terkait erat dengan profesionalitas yang

dimiliki suatu lembaga pendidikan. Hal yang lebih penting lagi adalah terkait dengan manajemen atau pengelolaan finansial yang tepat, terlebih dengan bagaimana suatu lembaga pendidikan dapat mencapai kemandirian dalam hal finansial, mengelola lembaga pendidikan dengan mengacu pada intensitas keuangan yang dimiliki.

Jika merujuk pada hasil laporan Bank Dunia, salah satu di antara faktor yang menjadi kendala kualitas atau mutu lembaga pendidikan di Indonesia adalah kompleksitas pengorganisasian pendidikan antara Kemendiknas yang bertanggung jawab dalam hal materi pendidikan, evaluasi buku teks dan kelayakan bahan-bahan ajar dan Kemendagri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagaan, sumber daya material dan sumber daya lainnya.

Pembahasan finansial lembaga pendidikan merupakan isu yang cukup mendasar dan kontroversial dalam ekonomi pendidikan karena terdapat ketidaksepakatan, tidak hanya pada apakah pemerintah sebagai satu-satunya lembaga yang berperan dalam pendidikan, tetapi juga mengenai apakah seharusnya pemerintah hanya memainkan sebagian peranan dalam menyelenggarakan pendidikan. Selain itu muncul beberapa pertanyaan lain; apakah pemerintah harus memberikan subsidi atau apakah seharusnya pemerintah yang mengoperasikan lembaga-lembaga pendidikan yang ada.

Namun sejalan dengan kebijakan otonomi daerah dimana persoalan pendidikan diserahkan ke daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuanganpun menjadi kewenangan yang diberikan langsung dalam pengelolaannya kepada sekolah atau lembaga pendidikan yang terkait. Ditegaskan pula dalam undang-undang sistem pendidikan nasional no. 20 tahun 2003 pasal 46 bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Anggaran fungsi pendidikan Indonesia sendiri seperti yang disampaikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2014 dan Nota Keuangannya di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta Jumat (16/8/13). Bahwa pada tahun 2014 anggaran untuk pendidikan sendiri menjadi Rp 371,2 triliun. Alokasi itu naik 7,5 persen jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan tahun lalu sebanyak Rp 345,3 triliun. Kenaikan anggaran pendidikan tersebut tentunya memberi dampak banyak bagi pengelolaan pendidikan di Indonesia. Karena sejauh ini pemerintah dapat memenuhi amanat konstitusi, alokasi biaya pendidikan sendiri mencapai 20% dari APBN. Namun, hal tersebut juga tidak bisa mengelakkan bahwa pendidikan yang berkualitas yang

ditopang oleh finansial mampu mewujudkan kemandirian di setiap lembaga pendidikan.

Kondisi finansial yang ada di lembaga pendidikan erat kaitannya dengan komponen keuangan sekolah. Meskipun tidak sepenuhnya, masalah pembiayaan (finansial) akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan erat dengan sarana, prasarana dan sumber belajar. Banyak lembaga pendidikan tidak dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara maksimal dan optimal hanya karena masalah keuangan untuk operasional sekolah. Meskipun kondisi zaman yang menuntut pendidikan yang murah dan berkualitas, bahkan gratis proses pendidikan senantiasa memerlukan finansial yang cukup banyak untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

Untuk mengupayakan kemandirian finansial dalam arti lain, lembaga pendidikan mampu mengoperasionalkan finansial yang ada tanpa ada ketergantungan yang mendasar dari pemerintah maupun pembiayaan dari orang tua siswa, tentunya bukanlah hal yang mudah dan perlu adanya terobosan-terobosan baru yang potensial, yang mampu bertahan dan berkembang secara mandiri. Dalam hal ini kewirausahaan yang dikelola guna *men-support* kondisi finansial pada lembaga pendidikan.

Pada prinsipnya memang bukan hal yang mudah, lembaga yang bergerak dalam pendidikan menjalankan kewirausahaan., karena

kewirausahaan adalah suatu gaya hidup dan memiliki prinsip-prinsip tertentu yang akan mempengaruhi strategi pada lembaga yang terkait. Lembaga pendidikan yang menginginkan kewirausahaan yang dijalankan dapat *men-support* finansial yang dibutuhkan dalam pengoperasionalisasian lembaga tersebut secara mandiri, dibutuhkan kematangan serta manajemen yang baik. Selain itu sosiolog David Mc Chelland menyatakan bahwa suatu negara akan dapat menjadi sejahtera manakala jumlah pengusahanya (*entrepreneur*) mencapai 2% dari total penduduknya. Sehingga upaya suatu lembaga pendidikan dalam membangun *entrepreneurship* merupakan perwujudan dari upaya mensejahterakan bangsa bukan saja dalam cakupan internal lembaga pendidikan tersebut.

Selain itu salah satu fungsi utama lembaga pendidikan adalah pengajaran yang tidak lepas dari dunia kewirausahaan (*entrepreneur*), setidaknya-tidaknya dalam terminologi. Namun, dalam perkembangannya lembaga pendidikan di Indonesia berfungsi majemuk dengan pendidikan sebagai intinya, dengan segala teori-teori yang rumit dan membingungkan anak didik, hingga akhirnya menghasilkan *output* yang kurang maksimal.

Inilah kenapa lembaga pendidikan yang mengupayakan suatu *entrepreneurship* tidak pernah benar-benar terlaksana di Indonesia. Semua hanya terjebak pada teori dan angka-angka matematis yang

hanya memperhitungkan lulus tidak lulusnya siswa ketika ujian nasional (UN) dilaksanakan, tanpa memikirkan *output* setelahnya tanpa solusi. Tanpa penanganan yang efektif sehingga setiap tahunnya selalu menyempitkan lapangan kerja. Hal lain lagi ialah lembaga pendidikan belum mampu menciptakan kondisi ekonomi yang mandiri yang dapat menopang seluruh kebutuhan finansial dalam pengelolaan lembaga yang dimiliki. Bukan hanya lembaga pendidikan yang berstatus swasta, namun lembaga pendidikan yang berada di bawah kontrol pemerintah (sekolah negeri) pun belum dapat mewujudkan kemandirian finansial melalui *entrepreneurship*.

Selain itu dalam mewujudkan kemandirian finansial, hal lain yang dapat ditempuh dan menjadi sorotan suatu lembaga pendidikan ialah *partnership*, di mana lembaga pendidikan berupaya menjalin kemitraan dengan lembaga ataupun instansi lain baik itu instansi pemerintah maupun swasta. Profesionalitas yang perlu dibangun dalam mengupayakan kemandirian finansial ialah mengupayakan *partnership* yang dapat memberikan *good income*. Banyak lembaga yang belum dapat mengupayakan *partnership* apalagi menjadikannya sebagai penguatan kemandirian finansial. Sejauh yang penulis ketahui dalam upaya membangun *partnership* dengan lembaga swasta tidaklah mudah, apalagi lembaga swasta yang tidak *open-ended* terhadap lembaga atau institusi lain.

Sejauh ini lembaga pendidikan Yayasan Al Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan gratis dari tingkat PAUD (pendidikan anak usia dini) hingga Sekolah Tinggi telah mampu memadukan adanya *entrepreneurship* dan *partnership* yang dapat menopang kebutuhan finansialnya. Dengan slogan yang dimilikinya “*free and quality education supported by entrepreneurship*” lembaga tersebut menjalankan kewirausahaan yang mendukung finansial yang dibutuhkan dalam upaya menjalankan proses pendidikan yang ada. Kewirausahaan yang dimiliki saat ini sekitar 14 cabang kewirausahaan, meliputi; Pabrik Air Hexagonal OIntika, Pabrik Tahu, Pabrik Roti, Nurul Iman Offset, Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias, Pembuatan Pupuk Organik, Pertanian, Daur Ulang Sampah, Paving Block, Peternakan Sapi dan Kambing, Toko Nurul Iman, Susu Kedelai, Even Organizer, dan konveksi Nurul Iman. Lembaga tersebut memulai dengan usaha yang sangat sederhana yaitu daur ulang sampah. Namun dengan profesionalitas yang dijalankan lambat laun tumbuh dan berkembang secara maksimal, hingga dapat menopang kebutuhan (finansial) lembaga pendidikan tersebut. Tidak hanya biaya pendidikan yang dijamin oleh lembaga tersebut, namun segala kebutuhan hidup yang diperlukan siswa pun dipenuhi. Dengan jumlah yang begitu besar, kurang lebih 10365 siswa/siswi membuat lembaga tersebut harus benar-benar intensif dalam menjalankan kewirausahaan

yang dimiliki. Jika dilihat dari kebutuhan finansial lembaga tersebut tentunya membutuhkan jumlah yang tidak sedikit. Kebutuhan yang diperlukan lembaga tersebut mencapai Rp. 22.995.000.000,00 pertahunnya. Sedangkan jumlah finansial yang diperoleh dari pemerintah hanya mencukupi 20 persen dari kebutuhannya. Sehingga beban itu semua harus dipenuhi oleh yayasan dengan memaksimalkan kewirausahaan yang dimilikinya, apalagi lembaga tersebut membebaskan biaya 100 persen kepada seluruh peserta didiknya.

Selain itu Yayasan Al Ashriyyah Nurul Iman juga mengembangkan *partnership* kerjasama dengan setiap lembaga, baik dari pihak pemerintah maupun swasta seperti Bank BRISyari'ah, Yayasan Dompot Dhu'afa, Yayasan Buddha Tzu-Chi Indonesia dan sebagainya baik yang berbasis *profit oriented* dan *non-profit oriented*. Sebagai lembaga yang berbasis pesantren memang terkadang menghadapi banyak kendala terlebih lembaga ini menerapkan pemberian beasiswa penuh terhadap seluruh peserta didiknya. Karena pendidikan yang gratis seringkali dianggap kurang berkualitas, sehingga menjadikan kesukaran suatu lembaga pendidikan dalam mendapatkan kepercayaan baik dari masyarakat maupun dari lembaga-lembaga lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah mengenai kemandirian finansial lembaga pendidikan melalui *entrepreneurship* dan *partnership* dengan studi kasus yang

dipilih ialah Yayasan Al Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School Parung Bogor.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan pada “Kemandirian Finansial Lembaga Pendidikan Melalui *Entrepreneurship* dan Partnership” sebuah studi kasus yang dilakukan pada Yayasan Al Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School Parung Bogor.

2. Sub Fokus Penelitian

Berdasar pada fokus penelitian, kemudian peneliti mengembangkan ke dalam sub-sub fokus untuk memudahkan peneliti dalam melihat lebih dalam tentang objek penelitian. Adapun sub fokus yang dimaksud adalah:

- a. *Entrepreneurship* yang dikembangkan dalam Yayasan Al Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School Parung Bogor.
- b. Partnership yang dibangun oleh Yayasan Al Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School Parung Bogor.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian masalah di atas, banyak faktor yang berpengaruh terhadap kemandirian finansial

lembaga pendidikan melalui *entrepreneurship* dan *partnership* . Oleh karena itu perlu dibatasi permasalahan penelitian terutama pada *entrepreneurship* dan *partnership* sebagai pendukung lembaga pendidikan tersebut sehingga mampu mandiri dalam finansial di lembaga pendidikan Al Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School Parung Bogor. Dengan demikian peneliti merumuskan masalah penelitian ini pada:

- a. Bagaimana penerapan *entrepreneurship* dan *partnership* dalam mewujudkan kemandirian finansial di Yayasan Al Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School ?
- b. Bagaimana pengelolaan finansial yang diterapkan di Yayasan Al Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School ?

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Teoretis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan peneliti khususnya dalam bidang kemandirian finansial lembaga pendidikan yang menerapkan *entrepreneurship* dan *partnership* khususnya dan menjadi bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Menambah wawasan pengetahuan dan khazanah keilmuan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, dan dapat menjadi bahan yang bermanfaat untuk pengembangan keilmuan manajemen pendidikan pada masa yang akan datang.

2. Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dapat dijadikan pertimbangan bagi lembaga–lembaga pendidikan yang berada di Indonesia dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan yang mandiri namun tetap berkualitas, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berkualitas, mandiri, bermartabat, berakhlak mulia sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat.